

### BAB III

#### PENDIDIKAN INDONESIA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945)

Kepentingan penjajah dalam konteks pendidikan atau melakukan dan memberikan pendidikan kepada pribumi hanyalah bentuk identitas kekuasaan terhadap bangsa yang dijajah dan menguatkan potensinya dalam perang dunia, seperti yang dilakukan pendidikan masa pendudukan Jepang dengan semboyan “Kemakmuran Bersama Asia Raya” dan gerakan 3A, Jepang tidak mendapatkan perlawanan yang berarti dari bangsa Indonesia. Jepang yang anti kolonial berusaha menghilangkan pengaruh Kolonial Belanda Indonesia. Dalam bidang pendidikan Jepang mengganti seluruh sistem mulai dari kebijakan pendidikan, sistem pendidikan, model pembelajaran, murid, guru, kurikulum pendidikan, hingga kompetensi kelulusan.

##### A. Landasan Filsafat

Pada tahun 1940 Jepang memiliki cita-cita untuk menjadi pusat dari daerah-daerah Maschuria, Daratan China, Kepulauan Philippina, Indonesia, Thailand, Malaysia, IndoChina, dan Asia (Rusia). Cita-cita tersebut lebih dikenal dengan istilah “Kesemakmuran Bersama Asia Raya”. Jepang akan menjadi pusat industri presisi, sedangkan China dikembangkan menjadi industri ringan dan industri tekstil. Daerah-daerah lainnya seperti Indonesia merupakan daerah pemasok sumber bahan mentah (Nuryanto, 2020: 41).

Perkembangan ekonomi dan industri Jepang nampak seolah-olah perluasan daerah itu mutlak perlu dan tidak dapat lain. Oleh karena itu rencana “Kemakmuran Bersama Asia Raya” dianggap sebagai suatu keharusan, oleh kalangan militer diterima dan disambut dengan hangat karena menjanjikan Pretise-pretise ke pahlawan dan pengabdian (Mestoko, 1985: 137).

Usaha mengindoktrinasi masyarakat Indonesia melalui landasan idiil *Hakko Ichiu* (persaudaraan universal) untuk kepentingan peperangan telah membawa perubahan besar pada struktur pemerintahan dalam segala aspek yang terkait dengan kondisi sosial, budaya, dan pendidikan. Oleh karena itu, Jepang menyadari pentingnya pendidikan untuk mempengaruhi mentalitas dan pola pikir masyarakat Indonesia, bangsa Jepang melancarkan propagandanya untuk menarik simpati rakyat dengan semboyan “Kemakmuran Bersama Asia Raya” dan mengajak masyarakat Indonesia untuk bersatu menyusun dan

mengarahkan kembali perekonomian Indonesia dalam rangka menopang upaya kepentingan militer Jepang untuk memenangkan perang. Kenyataannya bangsa Indonesia menjadi miskin dan menderita demi untuk kepentingan perang Jepang (Wahyudi, A, 2017).

Adanya semboyan “Kemakmuran Bersama Asia Raya” disambut baik dan didukung oleh militer, sehingga mulailah ekspansi Jepang. Jepang hadir di beberapa Negara termasuk Indonesia Jepang dengan menawarkan harapan baru, sehingga Jepang di Indonesia tidak mendapatkan perlawanan yang berarti.

Gerakan 3-A tampaknya mampu memikat hati bangsa Indonesia. Gerakan 3-A ini dibentuk pada tanggal 29 bulan April tahun 1942 untuk menyebarkan propaganda Jepang dengan upaya menarik simpati bangsa Indonesia. Gerakan 3-A juga memiliki arti, *Nippon* (Jepang) Cahaya Asia, *Nippon* (Jepang) Pelindung Asia, *Nippon* (Jepang) Pemimpin Asia

Landasan tersebut yang kemudian berpengaruh dalam perubahan semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, militer maupun pendidikan. Slogan 3-A juga menjadi landasan dalam setiap kebijakan Jepang. Kongkritnya landasan idiil pendidikan adalah mengajak bangsa Indonesia bekerja sama dengan Jepang untuk mencapai “Kemakmuran Bersama Asia Raya”. Oleh karena itu, setiap pelajar harus mengucapkan sumpah setia kepada kaisar Jepang dan membentuk Indonesia baru menuju “Kemakmuran Asia Raya”. Konsep ini dilandasi oleh konsep *Hakko Ichiu* (Menurut Setijadi dkk, 1976).

Slogan ini berarti “Delapan Penjuru Dunia Di Bawah Satu Atap”. *Hokko-Ichiu* digunakan sebagai slogan persaudaraan universal yang digunakan Jepang untuk menciptakan *Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya*. Pendidikan pada masa pendudukan Jepang lebih banyak dilaksanakan atas dasar landasan idiil yang disebut *Hakko Ichiu* yang intinya adalah pembentukan suatu lingkungan yang didominasi oleh Jepang yang meliputi bagian-bagian besar dunia. Cita-cita itu mengajak bangsa Indonesia bekerja sama dengan bangsa Jepang dalam rangka mencapai Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.

Didorong semangat untuk mengembangkan pengaruh dan wilayah sebagai bagian dari rencana membentuk Asia Timur Raya yang meliputi Manchuria, Daratan China, Kepulauan Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Indo China dan Rusia dibawah kepemimpinan Jepang, Negara ini mulai melakukan ekspansi militer ke berbagai Negara sekitarnya. Dengan konsep

“*Hakko Ichiu*” (Kemakmuran Bersama Asia Raya) dan semboyan “Asia Untuk Bangsa Asia”, bangsa fasis inipun menargetkan Indonesia sebagai wilayah potensial yang akan menopang ambisi besarnya. Dengan konteks sejarah dunia yang menuntut dukungan militer yang kuat, Jepang dalam mengelola pendidikan di Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan pasifik.

Selama masa pendudukan Jepang, banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sebelumnya berada dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, khususnya dalam bidang pendidikan. Kedatangan Jepang yang awalnya mengaku sebagai saudara tua dan berjanji membantu bangsa Indonesia lepas dari penjajahan pemerintah kolonial Belanda rupanya hanya rekayasa politik saja. Jepang lebih tertarik untuk memanfaatkan kekayaan alam dan SDM Indonesia untuk kepentingan memenangkan perang. Tidak hanya dari sektor ekonomi dan politik masyarakat Indonesia dimanfaatkan oleh Pemerintah Jepang, bahkan pada sektor pendidikan pun dijadikan sebagai sarana membantu keberhasilan militer Jepang. Pendidikan yang dikelola dan diatur oleh Jepang bukan untuk menghasilkan generasi yang berprestasi namun mendidik anak-anak Indonesia menjadi seorang buruh dan menjadi tentara militer untuk membantu Jepang berperang melawan Sekutu.

Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang pada saat itu dijiwai oleh semangat untuk militer Jepang. Pendidikan yang didasari oleh pendidikan kemiliteran, diawali dengan dilakukannya banyak perubahan terhadap pendidikan di Indonesia pada saat itu. Sifat *dualism* pendidikan yang sebelumnya telah lama melekat pada sistem penyelenggaraan pendidikan masa kolonial Belanda dengan sistem pendidikannya yang berlapis-lapis berusaha untuk dihapuskan, kemudian diganti dengan sistem pendidikan yang lebih sederhana.

Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kolonial Belanda pada waktu itu terkesan eksklusif dan hanya dapat diakses oleh golongan-golongan tertentu saja, yaitu golongan priyayi dan orang-orang keturunan Belanda sendiri kemudian dilebur bersama sekolah-sekolah *pertikelir* yang ada saat itu. Peleburan ini dimaksudkan untuk meniadakan kastanisasi atau sifat eksklusif sekolah-sekolah pemerintah saat itu. Sebagai akibatnya, saat itu banyak

sekolah-sekolah pemerintah dan sekolah-sekolah *partikelir* yang ditutup dan tidak diakui lagi keberadaannya.

Pendidikan dalam konsep baru ini kemudian diperkenalkan sebagai bagian dari propaganda Jepang, bahwa pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan yang sebelumnya eksklusif dan diperuntukkan hanya untuk kalangan tertentu saja, kemudian dibuka secara umum, dan dinyatakan terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada era Pendudukan Jepang, pendidikan sekolah bukan merupakan prioritas utama meskipun tetap menjadi hal yang cukup penting. Prioritas pemerintah militer Jepang di Indonesia adalah dalam sektor pemerintahan, propaganda, dan pendidikan sosial (Nuryanto, 2020: 41-43).

Pada saat perang Dunia II lah yang menyeret Jepang ke kancah perang Asia Raya di Pasifik yang menyimpan berbagai kepentingan Jepang. Jepang dengan kekuatan militernya berusaha untuk menjadi negara adidaya dengan meniru kolonialisme Barat. Indonesia yang memiliki sumber daya alam banyak dan sumber daya manusia yang melimpah merupakan target eksploitasi oleh Jepang. Kontrol penduduk di wilayah pendudukan ditunjukan untuk membantu Jepang memenangkan perang pasifik. Pendidikan merupakan hal yang paling utama sebagai alat untuk Jepang mempropagandakan tujuan pendudukan mereka di Indonesia (Nurma Lisa Dwi Lestari, 2015).

## **B. Kebijakan Pendidikan**

Indonesia memasuki periode pemerintahan baru setelah berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1942. Kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada militer Jepang pada tanggal 9 Maret 1942, Gubernur Jenderal Jinkheer Tjarda Van Starckenborgh Stachouwer bersama Letnan Jenderal Hein Ter Poorten tertinggi tentara Hindia Belanda datang ke Kalijati dan dimulai perundingan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan pihak tentara Jepang yang dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Imamura. Imamura menyatakan, bahwa Belanda harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat.

Letnan Jenderal Ter Poorten, mewakili Gubernur Jenderal menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Dengan demikian secara de facto dan de jure, seluruh wilayah bekas Hindia Belanda sejak itu berada dibawah kekuasaan dan administrasi Jepang. Hari ini juga, pada tanggal 9 Maret Jenderal Hein Ter Poorten memerintahkan kepada seluruh tentara Hindia

Belanda untuk menyerahkan diri kepada balatentara Kekaisaran Jepang (Rizal, A. N. S. 2014 : 170).

Dengan kalahnya Belanda atas militer Jepang tersebut menandai berakhirnya masa kejayaan dan pemerintahan Belanda atas Bangsa Indonesia. KNIL dibubarkan dan semua perlawanan dihentikan tanpa suatu pertempuran yang sengit, padahal pada mulanya mereka mengumandangkan semboyan “Lebih baik mati berdiri dari pada bertekuk lutut”. Dengan berakhirnya kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda Indonesia memasuki periode baru dalam sistem pemerintahan di bawah kekuasaan pendudukan Jepang.

Setelah berakhirnya Pemerintahan Hindia Belanda kini tentara pendudukan Jepang mulai berkuasa, tak ada satu sekolah pun yang diperkenankan dibuka kembali. Lagi pula persiapan-persiapan kearah itu belum diadakan. Masih banyak kesulitan-kesulitan yang perlu diatasi terlebih dahulu, lebih-lebih kesulitan mengenai guru, karena Pemerintah kolonial Belanda tidak mempersiapkan secara khusus guru-guru Indonesia untuk sekolah-sekolah menengah, apa lagi menengah atas, sehingga saat terakhir dari masa Penjajahan Belanda hanya ada beberapa orang guru Indonesia yang mempunyai wewenang penuh untuk mengajar sekolah lanjutan. Kesulitan lainnya adalah mengenai buku-buku pelajaran.

Semua buku pelajaran ditulis dalam bahasa Belanda, sedangkan pemerintah pendudukan Jepang melarang pemakaiannya. Akan tetapi sebaliknya, karena kesulitan-kesulitan inilah yang rupannya mendorong Bangsa Indonesia untuk melengkapi bahasanya dengan istilah-istilah baru yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan. Disamping itu, pemerintah pendudukan Jepang hanya mendorong Bangsa Indonesia untuk mempelajari bahasa Jepang yang masih asing sama sekali bagi telinga Bangsa Indonesia. Untuk maksud itu, pemerintah pendudukan Jepang membuka sekolah-sekolah yang khusus memberipelajaran Bahasa Jepang secara kilat. Sekolah-sekolah itu disebut *Nippongo Gakko*. Selain itu ada pula pendidikan yang disebut “*Hakko Ichiu*” yang mengajak Bangsa Indonesia bekerjasama dengan Bangsa Indonesia dalam rangka pencapaian “Kemakmuran Bangsa Asia Timur Raya”.

Membicarakan tentang pendidikan dasar pada masa pendudukan Jepang, kiranya tidak dapat lepas dengan keadaan pendidikan pada jaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda terdapat tingkatan-tingkatan pendidikan di sekolah dasar, yang satu sama lain

terdapat jurang pemisah. Tingkatan semacam tersebut pada masa pendudukan Jepang dihilangkan. Semua sekolah dasar memiliki derajat yang sama yaitu bernama Sekolah Rakyat. Penghapusan tingkatan pendidikan itu bagi bangsa Indonesia besar sekali manfaatnya, karena dengan demikian tidak terdapat lagi diferensiasi antara bangsa-bangsa kita sendiri yang pada hakekatnya sebagai manusia berkedudukan sama.

Dasar pendidikan di sekolah-sekolah ialah pengabdian kepada pemerintah pendudukan Jepang. Pendidikan diliputi oleh suasana perang, maka banyak nyanyian-nyanyian dan semboyan serta latihan-latihan dihubungkan dengan persiapan-persiapan untuk menghadapi perang. Dengan semboyan "Asia Timur Raya Untuk Kemakmuran Bersama", maka Semangat Jepang ditanamkan melalui sekolah-sekolah.

Pada masa pendudukan Jepang, penyelenggaraan pendidikan kurang teratur. Jumlah sekolah, baik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, maupun Sekolah Kejuruan sangat menurun. Hal ini mengakibatkan makin bertambahnya orang-orang yang buta huruf. Pendidikan di Sekolah Dasar diseragamkan menjadi 6 tahun. Hal ini untuk memudahkan pengawasan baik dalam hal isi maupun penyelenggarannya

Pemakaian bahasa Belanda di sekolah-sekolah dilarang oleh pemerintah pendudukan Jepang. Untuk itu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan merupakan mata pelajaran utama. Demikian pula bahasa Jepang diberikan sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah-sekolah. Semua buku yang berbahasa Belanda diganti dengan buku-buku terjemahan yang dalam waktu singkat dikeluarkan oleh Kantor Pengajaran (*Bunkyo Kyoku*). Bilamana buku-buku berbahasa Jepang atau terjemahnya tidak diterimanya, maka para guru berusaha menerjemahkan dan menyusunnya sendiri dari buku-buku yang berbahasa Belanda. Dengan demikian bahasa Indonesia mendapat peranan penting. Pelajaran bahasan daerah diberikan kepada murid-murid kelas I dan kelas II sebagai bahasa pengantar sampai mereka mengerti bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia baru mulai diajarkan di kelas III (Djohan Makmur & S., 1993 : Hlm 100-102).

Dan pada awal pendudukan Jepang, sekolah-sekolah masih ditutup, namun Sekolah Desa (*Volk School*), Sekolah Lanjutan (*Vervlog School*), Sekolah Pribumi Lengkap (*Volledige Tweede Klas School*), Sekolah Lanjut Putri (*Meisjes Vervlog School*) dibuka kembali dengan Dasar Undang-Undang No.12.

Pendidikan diselenggarakan pemerintah militer Jepang di Indonesia, sangat berbeda dengan pendidikan yang diselenggarakan pada masa Belanda, karena semua lapisan masyarakat pribumi diberikan hak untuk dapat mengaksesnya. Dengan menyederhanakan sistem pendidikan dan menghilangkan dualism pendidikan pemerintah Jepang memperoleh dua keuntungan sekaligus. Pertama, mereka tidak perlu meneruskan sistem pendidikan masa Kolonial Belanda yang rumit dan memerlukan kontrol yang ketat dari pemerintah, karena penyelenggaraan pendidikan yang berlapis-lapis. Keuntungan kedua, dihapuskannya dualisme pendidikan mendukung propaganda Jepang dalam rangka mengambil simpati masyarakat pribumi saat itu, bahwa tidak adanya pelapisan masyarakat dalam mengakses pendidikan membuat semua warga Indonesia menjadi mengerti akan pentingnya sebuah pendidikan.

Apabila ditelusuri dari riwayat kedatangannya, setelah Februari 1942 menyerang Sumatera Selatan, Jepang selanjutnya menyerang Jawa dan akhirnya memaksa Belanda menyerah pada maret 1942. Sejak itulah Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan era kemerdekaan (Nuryanto, 2020: 43-44).

Hal-hal tersebut antara lain :

1. Bahasa Indonesia berkembang secara luas diseluruh wilayah Indonesia. Istilah-istilah diciptakan untuk semua jenis kepentingan
2. Buku-buku bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena dalam suasana perang hak cipta internasional diabaikan. Bahasa asing selain bahasa Jepang dilarang.
3. Seni bela diri dan perang dimiliki oleh pemuda-pemuda, khususnya untuk pelajar Indonesia ternyata berguna di dalam perang kemerdekaan Indonesia yang terjadi kemudian
4. Perasaan rindu kepada kebudayaan dan kemerdekaan nasional berkembang dan bergejolak secara luar biasa
5. Karena dalam suasana perang dan serba kekurangan kreativitas para guru berkembang, misalnya apa bila tidak memperoleh buku dari kantor pengajaran *Bunkyo Kyoku* (Instansi pemerintah militer Jepang di bidang pendidikan), maka mereka menerjemahkan langsung dari buku-buku

bahasa asing. Alat-alat peraga diciptakan dari bahan-bahan yang ada dalam lingkungan sekitarnya

6. Diskriminasi menurut golongan penduduk, keturunan dan agama ditiadakan sehingga semua lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan
7. Bangsa Indonesia dilatih dan dididik untuk memegang jabatan pimpinan, walaupun dibawah penhawasan orang-orang Jepang
8. Sekolah-sekolah diseragamkan dan dinegerikan, meskipun sekolah-sekolah swasta seperti Muhammadiyah, Taman Siswa, dan sekolah – sekolah bekas *Zending*, dan *Missie* diizinkan terus berkembang tetapi dibawah pengaturan dan diselenggarakan sesuai dengan Sekolah Negeri (Djohan Makmur & S., 1993: Hlm 102).

Dalam menerapkan kebijakan pendidikan, guna untuk memperoleh dukungan dari tokoh pribumi, Jepang mengawalinya dengan menawarkan konsep PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) dibawah pimpinan Soekarno, M.Hatta, Ki Hadjar Dewantoro, dan K.H.Mas Mansur pada Maret 1943. Konsep inipun dirumuskan setelah kegagalan *The Triple Movement* yang sudah dibentuk sebelumnya tetapi tidak menyertakan wakil tokoh pribumi. Namun demikian, PUTERA akhirnya mengalami nasib serupa setahun kemudian. Pasca ini, Jepang tepat merekrut Ki Hajar Dewantoro sebagai penasehat bidang pendidikan mereka. Upaya Jepang mengambil tenaga pribumi ini dilatarbelakangi pengalaman kegagalan sistem pendidikan mereka di Manchuria dan China yang menerapkan sistem *Nipponize* (Jepang-isasi).

Oleh karena itu, di Indonesia mencoba memformat pendidikan yang mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. Menjelang akhir masa pendudukannya, Jepang dengan kuat untuk menerapkan sistem *Nipponize* kembali, dengan dikerahkannya *Sendenbu* (propagator Jepang) untuk menanamkan ideologi yang diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia Raya.

Setelah menguasai Indonesia, Jepang menginstruksikan ditutupnya sekolah-sekolah berbahasa Belanda, pelarangan materi tentang Belanda dan bahasa-bahasa eropa lainnya. Termasuk yang harus ditutup adalah *HCS (Hoolands Chinese School)*, sehingga memaksa peranakan China kembali ke sekolah-sekolah berbahasa Mandarin di bawah koordinasi *Hua-Chino Tsung Hui*, yang berimplikasi pada adanya proses *Resinification* (penyadaran dan

penegasan identitas sebagai keturunan bangsa China). Sehingga kondisi tersebut memaksa para guru untuk mentranslitkan buku-buku berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia untuk kepentingan proses pembelajaran.

Kebijakan untuk menyederhanakan sistem persekolahan oleh pemerintah Jepang menimbulkan banyak sekali dampak setelahnya. Seperti pendidikan yang sebelumnya berlapis-lapis dan sangat eksklusif menjadi lebih sederhana dan dinyatakan terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Namun rupanya, kebijakan tersebut kurang membawa dampak positif di bagi masyarakat Indonesia. Dampak yang terlihat dari penerapan kebijakan tersebut adalah :

1. Kebijakan peleburan mengakibatkan banyak sekolah yang kemudian ditutup dan tidak beroperasi lagi
2. Banyak gedung-gedung sekolah yang kemudian berubah fungsi menjadi barang-barang militer dan gudang penyimpanan amunisi dan bahan makanan persediaan perang militer Jepang.

Pada dasarnya pendidikan Jepang Untuk Indonesia hanya sebagai Propaganda belakang, karena pasca pemberlakuan kebijakan justru mengakibatkan semakin turunnya murid-murid yang bersekolah dan jumlah sekolah juga berkurang dengan sangat drastis.

Selain menghapus dualisme pendidikan dan menggantinya dengan kebijakan sekolah umum serta memberi kesempatan kepada seluruh lapisan untuk dapat mengakses pendidikan, pemerintah militer Jepang di Indonesia juga berusaha menghapus pengaruh barat dalam dunia pendidikan di Indonesia, dengan cara menghapus bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah. Bahasa yang diperoleh saat itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, selain itu juga, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang juga lebih ditekankan kepada Physical Training , bukan mental disiplin. Pendidikan militer Jepang ditekankan dalam rangka tercapainya target Jepang untuk memenangkan perang melawan sekutu. Karena pada saat Perang, Jepang memiliki jumlah prajurit yang sedikit (Nuryanto, 2020: Hlm 46-47).

Adanya kebijakan pendidikan dalam menduduki Indonesia, Jepang memiliki dua prioritas dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yakni : pertama, menghapus pengaruh kolonial Barat dikalangan rakyat Indonesia. Kedua, memobilisasi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang memenangkan perang Asia Timur Raya. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh Jepang , juga

merugikan masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan sehingga angka buta huruf di Indonesia pada saat itu meningkat.

### C. Sistem Pendidikan

Masa pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun merupakan masa yang sangat menentukan bagi bangsa Indonesia. Setelah Kejayaan penjajahan Belanda lenyap, Jepang berada di Indonesia. Mereka bertekuk lutut tanpa syarat kepada Jepang. Dan sistem persekolahan di masa pendudukan Jepang banyak mengalami perubahan karena sistem penggolongan baik baik menurut golongan bangsa maupun menurut status sosial dihapus. Dengan demikian terdapat integrasi terhadap macam-macam sekolah yang sejenis sejak masa Jepang bahasa dan istilah-istilah mulai dipergunakan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan (Mestoko, 1985 : Hlm138). Di masa pendudukan Jepang, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam yakni Sekolah Dasar selama 6 tahun. Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah untuk diawasi, sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Belanda di tutup. Begitu juga materi pengetahuan soal belanda dan Eropa di tutup.

Adapun tujuan Jepang ke Indonesia ialah menjadikan Indonesia sebagai sumber bahan mentah dan tenaga manusia yang sangat besar artinya bagi kelangsungan perang pasifik hal ini sesuai dengan cita-cita politik ekspansinya. Berbagai cara yang dilakukan oleh Jepang dalam mengelabui bangsa Indonesia untuk kepentingan politiknya. Demi kepentingan perang, Jepang mengambil pasukan dari Indonesia dengan menyuguhkan pendidikan kemiliteran. Namun demikian, dibalik kekejaman Jepang itu, Indonesia banyak memanfaatkan berbagai toleransi dari pihak Jepang terutama dalam bidang pendidikan.

Sistem pendidikan atau persekolahan pada masa pendudukan Jepang adalah :

1. Pendidikan Dasar (*Kokumin Gakko/Sekolah Rakyat*) lama pendidikan selama 6 tahun. Sekolah Rakyat (SR) merupakan sekolah yang pertama konversi nama dari Sekolah Dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda
2. Pendidikan Lanjutan, yang terdiri atas Sekolah Menengah Pertama (*Shoto Chu Gakko*) dengan lama pendidikan 3 tahun dan Sekolah Menengah Tinggi (*Koto Chu Gakko*) dengan lama pendidikan 3 tahun

3. Pendidikan Kejuruan, mencakup sekolah lanjutan yang bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian (Nuryanto, 2020 : Hlm 44)
4. Hampir semua Perguruan Tinggi ditutup, tetapi yang masih ada ialah Sekolah Tinggi Kedokteran (*Ika Dai Gakko*) di Jakarta dan Sekolah Teknik (*Kogyo Dai Gakko*) di Bandung. Kemudian Jepang membuka Sekolah Tinggi Pamongpraja (*Kenkoku Gakuin*) di Jakarta dan Sekolah Tinggi kedokteran Hewan di Bogor (Mestoko, 1985 : Hlm 139).

Ada juga perubahan penting yang terjadi di bidang pendidikan sejak dipegang oleh pemerintah Jepang di Indonesia, yakni :

1. Dihapusnya dualisme pengajaran, berbagai sekolah rendah yang diselenggarakan pada zaman pemerintahan Belanda dihapuskan sama sekali. Sehingga hanya ada satu sekolah rendah, yakni Sekolah Rakyat 6 tahun (*Kokumin Gakko*)
2. Sekolah-sekolah dasar diganti namanya menjadi sekolah pertama, sehingga susunan pengajarannya adalah Sekolah rakyat 6 tahun, Sekolah menengah 3 tahun, dan Sekolah Menengah tinggi 3 tahun
3. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi dan bahasa pengantar bagi semua jenis sekolah, selain itu bahasa Jepang dijadikan mata pelajaran wajib dan adat kebiasaan Jepang yang harus ditaati.

Jenis – jenis sekolah pada masa pendidikan Jepang, yakni :

a. Sekolah Rakyat

Pada masa pendudukan Jepang hanya ada satu macam sekolah untuk Sekolah Dasar, yaitu yang disebut dengan Sekolah Rakyat, terbuka untuk umum dan semua golongan penduduk. Lama pendidikannya 6 tahun. Sekolah Rakyat terdapat di semua kota dan desa atau tempat yang dahulunya ada Sekolah Desa, sekolah Kelas I, sekolah kelas II, atau HIS atau ELS

b. Sekolah Menengah Pertama (*Shoto Chu Gakko*)

Sebagai kelanjutan dari Sekolah Rakyat adalah Sekolah Menengah Pertama dengan lama pendidikan 3 tahun. Baru dalam bulan September 1942, setelah beristirahat kurang lebih 5 bulan, sekolah-sekolah menengah diperbolehkan dibuka kembali setelah diadakan persiapan-persiapan seperlunya

c. Sekolah Menengah Tinggi

Sekolah lanjutan umum tingkat atas, yang dibuka dengan nama Sekolah Menengah Tingkat (SMT), mula-mula hanya ada 4 buah untuk seluruh Indonesia, yaitu : Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian pada tahun 1943 dibuka 2 buah SMT di Bandung dan di Surakarta.

Sekolah ini mempunyai sifat pengajaran umum dan ditunjukan untuk menyiapkan para pelajar guna melanjutkan pada Sekolah Tinggi. Yang diterima SMT ialah mereka yang lulus pada ujian penghabisan Sekolah Menengah Pertama Negeri

d. Sekolah Kejuruan

Sekolah Kejuruan Menengah yang ada ialah Sekolah Pertukangan dan Sekolah Teknik Menengah. Pada masa pendudukan Jepang didirikan Sekolah Pelayaran dan Sekolah Pelayaran Tinggi di Cirebon

e. Sekolah Guru

Untuk mendidik calon guru terdapat tiga jenis sekolah, yaitu : Sekolah Guru 2 tahun (*Syoto Sihan Gakko*), Sekolah Guru 4 tahun (*Guto Sihan Gakko*), Sekolah Guru 6 tahun (*Koto Sihan Gakko*)

f. Perguruan Tinggi

Hampir semua perguruan tinggi ditutup, kecuali yang masih ada ialah Sekolah Kedokteran Tinggi (*Ika Dai Gakko*) di Jakarta yang dibuka kembali pada tahun 1943. Juga Sekolah Ahli Obat (*Yaku Gakko*) di Jakarta, dan Sekolah Kedokteran Gigi (*Shika Gakko*) di Surabaya. Tahun 1944 dibuka Sekolah Teknik Tinggi (*Kagyo Dai Gakko*) di Bandung, Sekolah Tinggi Kedokteran Hewan di Bogor, dan pada awal tahun 1945 dibuka Akademi Pemerintahan (*Kenkoku Gakko In*) di Jakarta (Djohan Makmur & S., 1993 : Hlm 103-104)

Adapun secara konkrit tujuan pendidikan pada masa Jepang di Indonesia sebenarnya adalah menyediakan tenaga kerja Cuma-Cuma yang disebut dengan "*Romusha*" dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan demi kepentingan Jepang. Oleh karena itu maka para pelajar diwajibkan mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi ketat. Hal ini terbukti dengan pelaksanaan senam setiap pagi yang disebut "*Taiso*" sebelum belajar juga bagi para pegawai sebelum kerja harus mengikuti komando dengan radio. Mengikuti latihan

kemiliteran yang disebut “*Kyoren*” bagi para pelajar dengan barisannya yang disebut dengan “*Seinendan*”, barisan keamanan rakyat yang disebut dengan “*Keibodan*” dan barisan prajurit yang disebut “*Heiho*”.

Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Beberapa kegiatan dan pembekalan bagi para guru sengaja dilakukan dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan suksesnya propaganda Jepang. Adapun beberapa propaganda yang dilaksanakan oleh Jepang pada saat itu, yakni :

1. Pelatihan Bagi Para Guru

Usaha penanaman ideologi Hakko melalui sekolah-sekolah dimulai dengan mengadakan pelatihan bagi para guru, karena para guru ini bertugas sebagai penyebar ideologi tersebut. Pelatihan para guru dipusatkan di Jakarta dan setiap kabupaten diwajibkan mengirim wakilnya untuk mendapat gembengan langsung dari pimpinan Jepang. Pelatihan ini berlangsung selama 3 bulan, jangka waktu tersebut rupanya sudah dirasa cukup untuk men-Jepangkan para guru

2. Pelatihan-pelatihan jasmani berupa pelatihan kemiliteran mengisi aktivitas keseharian para murid. Guna memperlancar proses pendidikan militer, pada tiap-tiap sekolah dibentuk barisan-barisan murid. Barisan murid-murid tingkat Sekolah Dasar disebut dengan “*Seinen-Tai*”, sedangkan barisan murid-murid Sekolah Lanjutan disebut dengan “*Gakutotai*”

3. Untuk menanamkan semangat Jepang, setiap hari para murid harus mengucapkan sumpah belajar dalam bahasa Jepang. Selain itu, mereka juga harus menguasai bahasa dan nyanyian Jepang. Setiap pagi diadakan upacara, dengan menyembah bendera Jepang dan menghormati Istana Tokyo

4. Agar bahasa Jepang lebih populer,, diadakan ujian bahasa Jepang bagi para guru dan pegawai. Pemilik ijazah/sertifikat kelulusan ini kemudian mendapat tambahan upah.

Selain sistem pendidikan yang banyak berubah, isi pengajaran yang diberikan oleh pemerintah Jepang juga mengalami banyak perubahan. Pengajaran dipergunakan sebagai alat propaganda dan juga untuk kepentingan perang Jepang. Murid-murid sering kali diharuskan kerja bakti, misalnya membersihkan bengkel, asrama, membuat bahan-bahan untuk kepentingan

pertahanan, dan lain sebagainya. Kegiatan lain yang harus ditaati oleh para murid adalah kewajiban untuk membuat pupuk kompos atau beramai-ramai membasmi hama tikus disawah, dengan tujuan untuk melipatgandakan hasil bumi. Selain itu, sebagian waktu belajar digunakan untuk menanam halaman sekolah dan pinggir-pinggir jalan dengan tanaman jarak (Nuryanto, 2020 : Hlm 48).

Tujuan Jepang menghapus sistem pendidikan dari Belanda. Karena Jepang ingin melakukan pembatasan dan pengendalian pendidikan di Indonesia, sebab pendidikan yang dilakukan Jepang berfokus agar Jepang menang dalam pertempuran melawan Sekutu yang merupakan musuh dari Jepang. Dalam hal ini Jepang ingin menang dalam perang Pasifik.

Hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan, menjadikan sistem pendidikan atau persekolahan menjadi lebih merakyat (populis). Pada prinsipnya terjadi perubahan bahwa sekolah menjadi terbuka bagi semua lapisan masyarakat Indonesia (Demokrasi Pendidikan). Hapusnya sistem Konkordansi dan masuknya sistem baru yang relatif lebih praktis dan terarah bagi kebutuhan masyarakat, meskipun kepraktisan tersebut lebih berarti untuk keperluan kemenangan perang Jepang.

#### **D. Model Pembelajaran**

Menurut R.E. Elson,2008 (dalam Nuryanto, 2020) Pendidikan yang diberlakukan pada era pendudukan Jepang di Indonesia adalah pendidikan semi militer dengan menerapkan latihan fisik pada para murid, kemiliteran dan indoktrinasi ketat. Selain itu, bahasa pengantar yang digunakan di sekolah-sekolah adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah, juga bahasa Jepang, sedangkan penggunaan bahasa Belanda untuk keperluan resmi dihapuskan oleh pemerintah pendudukan Jepang.

Dampak positif terkait hal tersebut, yaitu bahasa Indonesia bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Namun, ada pula dampak negatifnya, yaitu pendidikan di Perguruan Tinggi hampir tidak mungkin karena buku-buku dalam bahasa Belanda atau Inggris juga dilarang Menurut M.C.Ricklefs, 2008 ( dalam Nuryanto, 2020). Jepang menerapkan peraturan untuk menghormati ke arah matahari terbit karena bangsa Jepang mengakui sebagai keturunan *Dewa Matahari*. Selain itu, Jepang juga menerapkan etos keperajuritan kepada anak-anak sekolah dengan mengadakan olahraga senam (*Taiso*) dan mengikuti

latihan baris-berbaris atau perang-perangan serta menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, *Kimigayo*.

Menurut Aiko Kurasawa, 1993 (dalam Nuryanto, 2020) Jepang juga menggunakan lagu sebagai salah satu sarana propaganda untuk menyebarkan gagasan serta meningkatkan nilai moral dan semangat. Lagu-lagu militer Jepang dan kepahlawanan Jepang berulang-ulang diajarkan di sekolah-sekolah. Jepang menyebarkan buku-buku yang berisikan tentang lagu-lagu Jepang dengan alasan untuk meningkatkan moral dan semangat sebagai sesama Bangsa Asia. Namun, sebenarnya hal ini dilakukan Jepang untuk meningkatkan semangat rakyat yang hidup dalam situasi sosial ekonomi yang menyedihkan dan sebagai pengganti atau saluran pesan politik.

Meskipun banyak kemerosotan atau kemunduran dalam bidang pendidikan khususnya baik itu berupa kuantitas maupun kualitas. Tapi masih banyak hal-hal yang justru menguntungkan bangsa Indonesia sendirinya, Misalnya bangsa Indonesia dilatih dan didik untuk memegang jabatan walaupun masih dibawah pengawasan orang-orang Jepang.

Pemerintahan Jepang secara tidak langsung juga mempengaruhi kebudayaan kita, bahkan kita diajarkan bagaimana caranya mengatur suatu organisasi pemerintah bahkan sampai ukuran terkecil yaitu RT dan RW, keduanya merupakan bentukan dari pemerintah Jepang di Indonesia Menurut Ekajati, 1998 (dalam Saminto, 2019).

Kebijakan Jepang selanjutnya adalah yang menghapus diskriminasi menurut golongan penduduk, keturunan, dan agama di Indonesia. Jadi bukan hanya golongan bangsawan atau orang-orang Eropa saja yang diperbolehkan mengenyam pendidikan, bahkan seluruh bangsa Indonesia diperbolehkan bersekolah Menurut Hapsari, Ratna, 2012 (dalam Saminto, 2019).

#### **E. Murid**

Semenjak Jepang menguasai Indonesia, sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah ada pada masa Belanda diganti dengan sistem Jepang. Segala upaya ditunjukkan untuk kepentingan memenangkan Perang Jepang untuk Melawan Sekutu. Oleh karena itu, murid-murid hanya mendapatkan pengetahuan yang sangat sedikit, kegiatan persekolahan banyak diisi dengan kegiatan pelatihan perang atau bekerja untuk kepentingan militer Jepang.

Secara konkritnya tujuan yang ingin dicapai Jepang adalah untuk menyediakan tenaga Cuma-Cuma (*Romusha*) dan tenaga militer untuk

membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, murid-murid diharuskan mengikuti pelatihan fisik, pelatihan kemiliteran dan indoktrinasi ketat. Pada akhir masa Jepang tampak tanda-tanda tujuan men-Jepangkan anak-anak atau murid-murid Indonesia. Dikerahkan barisan propaganda Jepang yang terkenal dengan nama *Sendenbu*, untuk menanamkan ideology baru untuk menghancurkan ideologi Indonesia Raya (Nuryanto, 2020: Hlm 50-51).

Para murid dididik agar mempunyai semangat perang, seorang pendidik sebelum mengajar diwajibkan terlebih dahulu mengikuti didikan dan latihan (Diklat) dalam rangka penanaman ideologi dan semangat perang, yang pelaksanaannya dilaksanakan di Jakarta selama tiga bulan. Untuk menanamkan semangat Jepang, maka diajarkan bahasa Jepang dan nyanyian-nyanyian semangat kemiliteran pada para murid. Pendidikan yang diajarkan oleh Jepang kepada para murid untuk selalu disiplin serta memiliki jiwa dan semangat Jepang (*Nippon Seishin*). Semangat yang diutamakan ialah semangat kesatria atau *Bushido* yaitu berbakti kepada pemerintah Jepang (pemimpinnya) dan orang tuanya.

Karena murid adalah pengemban hari depan Indonesia dalam rangka “Kemakmuran Bersama Asia Raya”, kepada murid-murid dikenakan ketentuan dan indoktrinasi ketat. Kepada mereka antara lain dibebankan kewajiban dan keharusan sebagai berikut :

1. Setiap pagi harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang
2. Setiap pagi harus mengibarkan bendera Jepang “*Hinomaru*” dan menghormat kepada Kaisar Jepang “*Tennu Heika*”
3. Setiap pagi harus bersumpah setia kepada cita-cita Indonesia dalam rangka Asia Raya “*Dai Toa*”
4. Setiap pagi harus senam “*Taiso*” untuk melihara semangat Jepang
5. Melakukan-melakukan latihan fisik dan militer
6. Murid-murid pada waktu yang ditentukan melakukan kerja bakti “*Kinrohosi*” membersihkan asrama militer, jalan-jalan raya, menanam pohon jarak, mengumpulkan bahan-bahan untuk keperluan militer, dan lain sebagainya
7. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dan bahasa Jepang merupakan bahasa wajib. Bahasa daerah diberikan di Sekolah Dasar di kelas I dan II (Mestoko, 1985 : Hlm 140).

Pendidikan pada masa Jepang sangat memperhatikan. Kondisi pendidikan pada masa pemerintahan Jepang bahkan lebih buruk dari pada pendidikan pada pada masa penjajahan Belanda. Sebagai gambarannya dapat dilihat dari segi kuantitatif trend nya yang mengalami kemunduran seperti (sekolah,murid, dan guru).

Banyak sekali perubahan yang terjadi menyusul diterapkannya berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan di Indonesia oleh pemerintah Jepang, diantaranya adalah dengan dihapusnya dualisme pengajaran. Dampak dari kebijakan ini adalah selesainya riwayat susunan pengajaran Belanda dualistis, yang membedakan dua jenis pengajaran yakni pengajaran Barat dan pengajaran Bumiputra. Selain itu, dampak terbesar dari kebijakan ini adalah pada sistem perekrutan murid di sekolah. Dekolah yang tadinya kota-kotakan oleh perbedaan susku, ras dan agama kemudian disatukan dalam satu jenis sekolah. Semua kalangan diberi kesempatan untuk masuk ke lembaga sekolah.

Pada masa ini hampir semua rakyat Indonesia dapat memperoleh dan bekesempatan untuk menempuh pendidikan.hal ini dikarenakan pada masa Jepang sistem sosial menurut bangsa maupun status sosial yang diterapkan masa Hindia Belanda dihapuskan. Siswa China peranakan dan China totok pada masa Jepang juga tidak dibeda-bedakan menurut Rochiati Wiriaatadja,2002 (dalam Nuryanto, 2020).

Terbukannya kesempatan belajar pada masa Jepang menjadi salah satu penyebab naiknya jumlah murid-murid di sekolah, terutama Sekolah Dasar. Rata-rata jumlah murid tiap sekolah sebanyak 113 orang pada tahun 1940, meningkat menjadi 178 orang pada tahun 1944, ini berarti meningkat 60%. Apabila dibandingkan pada masa Kolonial Belanda, jumlah siswa sekolah naik menjadi 78% dan jumlah sekolah meningkat menjadi 32%. Apabila pada masa Belanda jumlah murid-murid per kelas ada 25 murid, pada masa Jepang meningkat menjadi 35 hingga 40 murid.

Menurut Aiko Kurasawa (dalam Nuryanto, 2020) menunjukkan bahwa jumlah murid-murid di sekolah pertama :

- a. Pada tahun 1944 jumlah murid ada 1.806.233 orang
- b. Sekolah Rakyat jumlah murid ada 552.102 orang
- c. Sekolah Rakyat Swasta jumlah murid ada 267.625 orang.

Banyaknya jumlah murid-murid pada masa tersebut juga dikarenakan dorongan pemerintah pendudukan Jepang yang mewajibkan orang harus bisa

membaca dan menulis untuk dapat menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan desa maupun jabatan administrasi lainnya sehingga orang-orang desa termotivasi untuk belajar dan bersekolah.

#### **F. Guru**

Bergantinya kekuasaan Belanda ke tangan Jepang pada bulan Maret 1942 mempengaruhi pula kebijakan mengenai pendidikan secara umum. Khusus untuk Sekolah Guru, pemerintah Jepang menggabungkan berbagai sekolah guru menjadi satu sekolah. Pemerintah Jepang hanya membuka sekolah guru yang didirikan oleh pemerintah, sedangkan sekolah guru swasta ditutup dan tidak diizinkan untuk dibuka. Hanya Perguruan Muhammadiyah dan Taman Siswa yang diperbolehkan untuk dibuka.

Sekolah guru bentukan pemerintah militer Jepang memiliki sistem yang berbeda, yaitu adanya peraturan pemisahan antara siswa laki-laki dan perempuan. Siswa laki-laki menempati sekolah guru laki-laki atau disingkat (SGL), sedangkan siswa perempuan menempati sekolah guru perempuan (SGP). Para siswa SGL dan SGP merupakan lulusan Sekolah Dasar yang kemudian menempuh pendidikan selama empat tahun dalam asrama.

Penerapan sistem asrama ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah Jepang mengontrol dan mendoktrin siswa melalui berbagai program pendidikan. Program pendidikan tersebut, diantaranya latihan kemiliteran (*kyooren*), pengabdian masyarakat atau kerja bakti paksa (*Kinrohoshi*), dan pendidikan jasmani. Sekolah calon guru SD di zaman Jepang terdapat di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, dan Belitar.

Keadaan pendidikan dan pengajaran pada masa pemerintahan militer Jepang merosot dengan dratis dibandingkan dengan keadaan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sekolah Dasar menurun jumlahnya dari 21.500 menjadi 13.500, Sekolah Lanjutan dari 850 menjadi 20. Begitu pula murid Sekolah Dasar menurun pula sebanyak 30% sedangkan murid Sekolah Menengah merosot 90%. Jumlah Guru Sekolah Dasar menurun 35% dan guru Sekolah Menengah merosot 95% sehingga tinggal 5% yang aktif. Pendek cerita dalam bidang pendidikan pada masa Jepang memperlihatkan kemunduran menyolok.

Agar supaya terdapat keseragaman dalam pengertian dan maksud-maksud pemerintah pendudukan Jepang, maka bagi guru diadakan latihan-latihan di Jakarta. Tiap-tiap kabupaten/daerah mengirimkan beberapa orang guru

untuk dilatih. Setelah selesai mengikuti latihan tersebut, mereka kembali ke daerahnya masing-masing untuk kemudian melatih guru-guru lainnya mengenai hal-hal yang mereka peroleh dari Jakarta. Adapun bahan-bahan pokok yang mereka dapat dalam latihan, yakni :

1. Indoktrinasi mental ideologi mengenai "*Hakko I-Chiu*" dalam rangka kemakmuran bersama di "Asia Raya"
2. Latihan kemiliteran dan semangat Jepang (Nippon Seisyin)
3. Bahasa dan Sejarah Jepang dengan adat istiadatnya
4. Olahraga, lagu-lagu, dan nyanyian Jepang. (Mestoko, 1985 : Hlm 139-140).

Pada masa pendudukan Jepang, jumlah tenaga guru di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini terjadi karena banyak guru yang ditempatkan atau bekerja di sektor lain, seperti administrasi, pangreh praja, militer, bahkan sebagai petugas propaganda Jepang. Status guru pada masa pendudukan Jepang pernah ditingkatkan menjadi pegawai pemerintah. Selain itu, guru juga mengalami kenaikan upah sesuai dengan tingkatan pangkatnya Menurut Aiko Kurasawa, 1993 :370 (dalam Nuryanto, 2020). Gaji guru masa Jepang ini kurang lebih naik 150% dari pada gaji guru pada masa pemerintah Kolonial Belanda. Namun, perlu diingat bahwa pada masa Jepang ekonomi mengalami inflansi sehingga nilai tukar uang semakin melejit.

Langkah profesi guru pada masa Jepang menyebabkan beban yang harus ditanggung oleh para guru yang sudah ada menjadi semakin besar. Yang ini disebabkan karena jumlah murid setiap kelas yang semakin banyak. Selain itu, guru juga mendapat beban ganda karena selain mengajar, mereka juga harus melakukan pekerjaan politik, seperti kampanye propaganda, kursus pencerahan, pengajaran untuk umum dan lain sebagainya.

Adapun upaya untuk mengatasi kelangkaan guru dilakukan pemerintah Jepang dengan merekrut guru-guru baru, guru bantu, atau memberi pelatihan jangka pendek. Ada tiga jenjang yang harus dilalui oleh seorang calon guru pada masa pendudukan Jepang, yakni :

1. Ujian untuk guru reguler di Sekolah Rakyat, yaitu bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah selama 9 tahun dan sudah berusia 18 tahun. Mereka yang lulus ujian ini dianggap setara dengan lulusan Sekolah Guru

2. Ujian untuk guru bantu di Sekolah Rakyat, yaitu bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah selama 9 tahun dan berusia 18 tahun. Mereka yang lulus ujian ini dianggap setara dengan lulusan Sekolah Guru Menengah Pertama
3. Ujian untuk guru Sekolah Rakyat Pertama, yaitu mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah selama 6 tahun dan berusia di atas 16 tahun. Menurut Aiko Kurasawa, 1993 :370-371 (dalam Nuryanto, 2020).

Selain itu, kursus untuk para guru diadakan di berbagai jenjang, dan yang telah lulus dalam satu jenjang dapat mengikuti ke jenjang yang lebih tinggi. Ujian kecakapan guru diadakan di setiap keresidenan dengan meliputi materi yang diujukan, seperti moral, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa daerah, matematika, sejarah, geografi, ilmu alam, menggambar, Taiso, dan menyanyi.

Kelangkaan terjadi untuk guru yang bertugas mengampu mata pelajaran bahasa Jepang. Hal ini disebabkan karena guru-guru lokal tidak banyak yang menguasai materi pelajaran bahasa Jepang. Untuk memenuhi kebutuhan guru bahasa Jepang kemudian pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia mendatangkan guru bahasa dari Jepang untuk memberikan pelatihan atau kursus singkat kepada guru-guru lokal.

Guru-guru yang dikirim dari Jepang juga harus memiliki kualifikasi yang diberlakukan oleh pemerintah militer Jepang. Syarat yang diberlakukan adalah lulusan universitas untuk guru pria dan lulusan kolese atau lebih tinggi untuk guru perempuan. Baik guru perempuan atau guru pria harus bisa menguasai bahasa Inggris meskipun tidak fasih dan batas usia maksimal 45 tahun. Guru-guru yang berasal dari Jepang ini ditempatkan di setiap keresidenan masing-masing 4 orang. Mereka mengajar di tingkat Sekolah Lanjutan dan sekolah bahasa Jepang untuk umum. Kelangkaan guru pada masa pendudukan Jepang menyebabkan mutu pendidikan saat itu menjadi sangat rendah. Menurut Aiko Kurasawa, 1998 : 366 (dalam Nuryanto,2020).

Pada masa Jepang, tenaga pendidik yang digunakan merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda. Namun, guru-guru tersebut diberikan latihan, kuliah, atau kursus singkat. Sayangnya, tidak semua guru pada masa pemerintahan Hindia Belanda memilih profesi yang sama ketika Jepang menduduki Indonesia. Hal tersebut terjadi karena adanya alasan seperti, saat itu,

profesi guru dianggap kurang prestisius jika dibandingkan dengan pekerjaan lain, misalnya pegawai pemerintahan.

Banyak guru di Era Hindia Belanda yang sudah berganti profesinya ketika Jepang menduduki Indonesia. Banyak guru yang tidak terbiasa mengajar dengan menggunakan bahasa Indonesia, apa lagi bahasa Jepang. Oleh karenanya guru selalu memakai bahasa Belanda ketika mengajar pada masa pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Meskipun demikian, guru yang tetap ingin melanjutkan profesinya di masa pendudukan Jepang diberikan kursus-kursus singkat. Namun, tentu saja kursus singkat ini diberikan agar guru sekaligus bisa menjadi propagandis. Kursus ini tidak hanya diberikan untuk guru di sekolah umum, melainkan juga diberikan kepada guru pengajar di pondok pesantren, misalnya ustad dan kyai.

Pengajaran dalam kursus atau kuliah ini diberikan oleh pengajar lokal dengan bahasa Indonesia sebagai pengantar. Namun, pengajar dari Jepang juga dihadirkan dan memberikan pelajaran dengan menggunakan bahasa Jepang tanpa disertai oleh penerjemah. (Nuryanto, 2020)

Program kuliah ini dilakukan selama 2 atau 3 bulan dengan beragam tema yang bernuansa indoktrinasi, misalnya materi tentang bagaimana menggalang kerja sama dengan Jepang dalam hal-hal yang menyangkut negeri penjajahan itu, termasuk bahasa Jepang, nyanyian Jepang, gerak badan (Taiso), latihan kemiliteran (Kyoren), pengajaran moral, dan kursus untuk guru perempuan dengan karakter khusus Jepang. Jumlah guru yang dilatih pada saat itu masih sangat terbatas, 692 guru pria dan 419 guru wanita pada tahun 1944. Menurut Aiko Kurasawa, 1998 : 372 (dalam Nuryanto, 2020).

Pemerintah militer Jepang mencurahkan banyak waktu untuk melakukan indoktrinasi guru dengan “semangat Jepang”. Memahami pola pikir orang Jepang lebih ditekankan ketimbang membuat guru-guru memiliki persyaratan akademik dan memiliki teknik mengajar atau pengetahuan akademik yang mendalam. Menurut Aiko Kurasawa, 1998 : 372 (dalam Nuryanto, 2020).

Pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia juga memberlakukan kebijakan Ordonasi guru yang pernah diterapkan pemerintah Hindia Belanda sebelumnya. Ordonasi guru di Era Jepang ini cenderung lebih keras, termasuk mewajibkan kepemilikan surat izin bagi guru-guru agama.

## G. Kurikulum Pendidikan

Menurut Legge, 1993 (dalam Susanti, F. 2013) Pemerintah pendudukan Jepang memberlakukan kebijakan dalam bidang pendidikan yang kurikulumnya ditujukan untuk keperluan perang Asia Timur Raya. Sistem dualisme dan konkordansi yang pernah diterapkan masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dihapus dan pendidikan sangat terbuka bagi semua anak-anak pribumi, sehingga semua siswa mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.

Sistem pengajaran dan struktur kurikulum yang diterapkan di sekolah pada masa pendudukan Jepang, yakni :

### 1. Pendidikan dasar (*Kokumin Gakko/Sekolah Rakyat*)

Pada masa pendudukan Jepang seluruh Sekolah Dasar hanya berbentuk Sekolah Rakyat (*Kokumin Gakko*), Adapun beberapa model Sekolah Rakyat. Ada pun beberapa model Sekolah Rakyat : pertama, Sekolah Rakyat (*Kokumingakko*) yang memberikan pelajaran dasar (*Shotoka*) dan pelajaran lanjutan atau komprehensif (*Futsuka*), masing-masing diselenggarakan selama 3 tahun. Kedua, Sekolah Pertama (*Otokokumingakko*) yang hanya memberikan pendidikan selama 3 tahun. Ketiga, Sekolah Rakyat yang hanya memberikan pendidikan komprehensif (*Futsuka Kokumingakko*). Sekolah jenis ini memiliki tipe yang berbeda, yakni sekolah 4 tahun dan sekolah 7 tahun. Pada tahun ajaran 1944 semua sekolah jenis ini dijadikan sekolah 3 tahun dan semua Sekolah Rakyat (*Shotoko kumingakko*).

Di masa pendudukan Jepang sekolah pada tingkat dasar terbuka bagi penduduk Indonesia tanpa diskriminasi ras dan suku, tanpa diskriminasi pangkat dan kedudukan sosial. Sistem satu guru dua kelas dan satu ruang untuk dua kelas diterapkan untuk menanggulangi kurangnya guru pendidik. (Ariantoni, 2017)

Kurikulum Sekolah Rakyat di Jepang-kan melalui menerapkan mata pelajaran baru seperti, bahasa Jepang, Pendidikan Mental, Pendidikan Jasmani, dan Kegiatan Keterampilan. Sekolah Dasar pada masa pendudukan Jepang lebih menekankan pendidikan praktis dan kurikulum Sekolah Dasar pada masa pendudukan Jepang masih amat langka. Karena itu Sekolah dasar pada masa pendudukan Jepang hanya dikemukakan tentang struktur program kurikulum Sekolah 6

tahun yang berisikan daftar mata pelajaran dan alokasi waktu tiap mata pelajaran per minggu.

## **2. Sekolah Menengah Pertama (*Shoto Chu Gakko*)**

Pemerintahan militer Jepang memberikan perhatian kepada pendidikan dan terutama kurikulum. Pendidikan pemerintahan pendudukan militer Jepang mempersiapkan generasi baru Indonesia yang mendukung kekuasaan Jepang dan menghasilkan mereka yang terlatih dalam kemiliteran. Pemerintah militer Jepang memerlukan banyak orang untuk dilatih dalam militer, memiliki cinta Jepang dan semangat Jepang. Oleh karena itu pendidikan lebih terbuka bagi banyak golongan bukan hanya golongan tertentu saja yang boleh berpendidikan.

Pada masa kekuasaan pemerintah pendudukan militer Jepang, sekolah-sekolah untuk rakyat yang didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda (*Volks School dan Vervolg School*) dihapus, diganti dengan Sekolah bergaya Jepang yang dinamakan Kokumin Gakko dengan masa belajar 6 tahun. MULO dan AMS di ganti dengan Sekolah Menengah Pertama (*Shoto Chu Gakko*).

Struktur kurikulum *Shoto Chu Gakko* lebih sederhana, karena dalam struktur kurikulum *Shoto Chu Gakko* semua mata pelajaran wajib dan tidak ada yang berstatus pilihan. Kehidupan militer pada masa pendudukan Jepang memberi pengaruh yang cukup besar terhadap kurikulum *Shoto Chu Gakko*. Mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum *Shoto Chu Gakko* mencerminkan kebijakan pendidikan pemerintahan pendudukan Jepang untuk men-Jepangkan bangsa Indonesia. Selain mata pelajaran yang bersifat eksakta materi pelajaran lain disesuaikan dengan kepentingan pendudukan Jepang di Indonesia, termasuk untuk menarik perhatian bangsa Indonesia itu sendiri. Mata pelajaran bahasa Belanda Dihilup dan diganti oleh mata pelajaran bahasa Jepang, dalam kurikulum *Shoto Chu Gakko* ditambah mata pelajaran pendidikan semangat moral dan bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran resmi. (Hasan, 2017).

## **3. Sekolah Menengah Tinggi (SMT)**

Kurikulum SMA atau Sekolah Menengah Tinggi (SMT) pada masa pendudukan Jepang secara prinsip hamper sama dengan

kurikulum AMS pada masa Belanda, karena masih menggunakan pola AMS bagian A untuk Pengetahuan Kemasyarakatan dan B untuk pengetahuan Alam. Kurikulum SMT atau yang pada waktu itu disebut dengan “Jadwal Jam Mata Pelajaran”.

Pelaksanaan kurikulum Sekolah Menengah Tinggi (SMT) hanya berlaku 3 tahun sesuai dengan lamanya pendudukan Jepang di bekas wilayah pemerintahan Hindia Belanda, yaitu mulai tahun 1942-1945. Namun demikian, pada masa perang kemerdekaan 1945-1949 sampai dengan Dekrit Presiden 1959, kurikulum ini masih digunakan dengan beberapa perubahan yang dianggap perlu sampai dengan keluarnya ketentuan yang mengatur pendidikan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. (Hermana Soemantrie & Hidayati, 2017).

Namun pada dasarnya kurikulum (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, dan Sekolah Tinggi) pada masa pendudukan Jepang ditunjukkan untuk kepentingan militer Jepang dalam menghadapi Perang Pasifik. Kurikulum pendidikan pada masa pendudukan Jepang tidak banyak disebutkan karena tujuan utama adalah membentuk prajurit-prajurit dan tenaga kerja (*Romusha*), sehingga kurikulum yang diterapkan lebih menitikberatkan pada pengajaran disiplin militer. Materi pelajaran yang diberikan yaitu pendidikan semangat Jepang (*Nippon Seishin*), bahasa dan adat istiadat Jepang, nyanyian Jepang (*Kimigayo*), pendidikan senam dan olahraga (*Taiso*), pendidikan tentang dasar-dasar pertahanan seperti latihan fisik dan kemiliteran (*Kinrohosy*) Menurut Poesponegoro dan Notosusanto, 2008 (dalam Wahyudi, A.)

Pendudukan Jepang di bumi Nusantara berjalan tidak begitu lama, meskipun demikian banyak sekali pengaruhnya bagi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia sangatlah besar. Tujuan pendidikan pada masa itu telah disisipi misi *Nipponisasi* dan upaya-upaya pemberdayaan bangsa Indonesia untuk membantu kepentingan perang Jepang. Misi tersebut dilakukan dengan mendekati tokoh-tokoh kiai yang menjadi panutan umat islam agar dapat dijadikan sandaran politik mereka.

Pemerintah militer Jepang di Indonesia mencoba menyusun kurikulum baru yang jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum baru yang disusun ini tentunya digunakan untuk mendukung cita-cita Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Kurikulum baru diterapkan mulai tahun 1943 pada bulan April untuk menjalankan pendidikan dengan mata pelajaran dan buku-buku penunjang yang baru. Adapaun jumlah pelajaran yang diajarkan di Sekolah Dasar diterapkan oleh pemerintah militer Jepang mencapai 16 pelajaran meliputi :Latihan kemiliteran (*Kyoren*),Pelajaran moral (*Shusin*), Pekerja praktis (*Sagyo*), Bahasa Jepang, Bahasa Indonesia, Bahasa daerah (Jawa, Sunda, dan Madura), Sejarah, Geografi, Matematika, Ilmu alam, Olahraga, Musik, Seni menulis (*Shuji*), Kerajinan tangan, Melukis, Dan perawat rumah (khusus untuk siswa perempuan).

Ada beberapa materi pelajaran yang mengalami perubahan jika dibandingkan pendidikan pada masa Hindia Belanda. Perubahan materi tersebut tentunya terkait dengan keinginan tujuan Jepang menjadi pusat "Kemakmuran Bersama Asia Raya". Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Jepang dicita-citakan menjadi Lingua Franca sehingga pelajaran bahasa Jepang sangat diperhatikan pemerintah militer Jepang seluas mungkin dengan maksud untuk membuat murid memahami tentang semangat dan kehidupan Jepang (Nuryanto, 2020 : Hlm 52).

Keseriusan pengajaran Jepang dalam pembelajaran bahasa Jepang ditunjukkan dengan mengirim guru dari Jepang untuk Sekolah Lanjutan. Selain itu, alokasi waktu untuk bahasa Jepang sangat banyak, yaitu minimal 3 jam dan maksimal 10 jam. Untuk menunjang pembelajaran dengan model dan ideologi yang baru dan berbeda dari yang sebelumnya, maka diperlukan buku penunjang yang sesuai dengan kurikulum baru yang berisi :

- a. Pelajaran moral
- b. Bahasa Jepang
- c. Lagu-lagu
- d. Dan sejarah Jepang.

Buku-buku pelajaran ditahun sebelumnya yang digunakan pada masa Belanda dikaji ulang dan diperbaiki. Hasilnya adalah buku pelajaran baru dengan sampul buku bergambar pohon sakura dan gunung fuji khas Jepang. Dan buku pelajaran yang berhasil diterbitkan sebanyak 57 jenis dan disebarakan ke berbagai daerah meskipun belum merata, Menurut Aiko Kurasawa, 1993 : 368-369.

Bahasa Indonesia dan daerah digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Mengenai pemilihan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar pendidikan dikarenakan pada anak-anak sekolah rendah hanya sedikit yang bisa memahami bahasa Indonesia. Hal tersebut yang menjadikan bahasa daerah menjadi bahasa pengantar pada tahun-tahun pertama untuk pendidikan dasar. Dampak digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan adalah semakin meluasnya bahasa Indonesia ke desa-desa, namun sayang bahasa Indonesia juga tidak banyak digunakan sebagai pengantar karena guru-guru di desa-desa tidak terlalu menguasai bahasa Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang bisa disimpulkan bahwa kurikulum yang telah dirancang tidak bisa diimplimentasikan seperti seharusnya. Di lapangan, kurikulum harus menyesuaikan karena beban tugas tambahan dan kegiatan kerja bakti yang memakan waktu. Bangsa Jepang muncul sebagai negara kuat di Asia. Ketika kondisi dunia saat terjadi perang, Jepang tak tinggal diam dan menampilkan diri ikut dalam peperangan tersebut. Jepang mendapatkan prestasinya ketika menghadapi Rusia. Jepang bercita-cita besar yaitu, menjadi pemimpin Asia Timur Raya dan berhasil menaklukan Belanda yang telah lama menjajah Indonesia. Sekolah-sekolah yang ada pada masa Belanda diganti dengan sistem Jepang. Selama Jepang menjajah Indonesia, hampir sepanjang hari hanya diisi dengan kegiatan latihan perang atau bekerja. Jika ada kegiatan-kegiatan sekolah, hal tersebut tidak jauh dengan konteks Jepang sedang berperang. Kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan sekolah tersebut yakni:

1. Menumpulkan batu dan pasir untuk kepentingan perang
2. Membersihkan bengkel-bengkel dan asrama-asrama militer

3. Menanam ubi-ubian dan sayur-sayuran di pekarangan sekolah untuk persediaan bahan makanan
4. Menanam pohon jarak untuk bahan pelumas

Menurut Rifa'i, 2011 : 83-84. Di samping itu murid setiap pagi wajib mengucapkan sumpah setia kepada Kaisar Jepang, lalu dilatih kemiliteran.

Pelajaran-pelajaran yang diberikan pada masa penjajahan Jepang meliputi Sejarah Ilmu Bumi, Bahasa Indonesia (Melayu), Adat Istiadat, Bahasa Jepang, Ideologi Jepang, dan Kebudayaan Jepang. Untuk menyebarkan ideologi dan semangat Jepang, para guru ditatar secara khusus oleh pemimpin-pemimpin Jepang selama tiga bulan di Jakarta. Mereka diharuskan dan diwajibkan meneruskan materi yang telah diterima kepada teman-temannya. Untuk menanamkan semangat Jepang itu kepada murid-murid, diajarkan bahasa Jepang, nyanyian-nyanyian perjuangan, atau nyanyian-nyanyian semangat kemiliteran Menurut Rifa'i, 2011 : 85 (dalam Nuryanto, 2020). Memang kehadiran Jepang di Indonesia dapat menanamkan jiwa berani pada bangsa Indonesia. Akan tetapi semua itu hanya untuk kepentingan Jepang saja.

Sebenarnya tujuan pendidikan Jepang di masa penjajahan Jepang tidaklah banyak yang dapat diuraikan sebab murid disibukkan dengan peperangan sehingga perhatian terhadap pendidikan sangat sedikit. Rayuan Jepang kepada bangsa Indonesia mengatakan bahwa Jepang adalah Saudara Tua yang akan datang ke Indonesia untuk mencapai Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya atau yang terkenal dengan *Hakko Ichiu* sebagai landasan utama pendidikan pada masa pendudukan Jepang.

Penjajahan Jepang mengambil kebijakan bahwa bahasa Belanda dilarang dipergunakan sama sekali. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi, baik di kantor-kantor maupun di sekolah-sekolah. Dan bahasa Jepang menjadi bahasa kedua. Selama masa pendudukan Jepang inilah bahasa Indonesia berkembang dan dimoderenkan sehingga menjadi bahasa pergaulan dan bahasa ilmiah Menurut Rifa'i, 2011 :85 (dalam Nuryanto, 2020: Hlm 55).

Dari sudut lain, dapat kita lihat bahwa secara konkret tujuan pendidikan pada masa Jepang di Indonesia adalah menyediakan tenaga kerja cuma-cuma (*Romusha*) dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan demi kepentingan Jepang. Pengaruhnya adalah para pelajar diharuskan mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi ketat. Hal ini terbukti dengan pelaksanaan senam pagi yang disebut *Taiso* sebelum belajar juga bagi para pegawai sebelum bekerja mengikuti komando dengan radio.

Dengan penyederhanaan sistem pendidikan di sekolah di masa Jepang, kesempatan belajar terbuka lebar bagi semua golongan penduduk di Indonesia, semua mendapatkan kesempatan yang sama. Jalur-jalur sekolah dan pendidikan menurut penggolongan keturunan bangsa, strata, ataupun strata sosial telah dihapuskan.

Kebijakan di bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh Jepang memang banyak yang terlihat seolah-olah ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (mulai dari pemberlakuan sekolah gratis, pemberian tambahan insentif guru, hingga penyederhanaan sistem persekolahan), tetapi pada kenyataannya kebijakan tersebut sarat dengan muatan politisi yang membawa misi *Nipponisasi* dan pemberdayaan bangsa Indonesia untuk perburuan dan mobilisasi militer.

#### **H. Kompetensi Lulusan**

Jepang memang mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Namun, dilihat dari hasilnya, kualitas siswa pada era Jepang bisa dikatakan lebih rendah dari pada masa Hindia Belanda. Hal ini disebabkan karena dari faktor guru dan siswa. Guru kualitasnya menurun karena pelatihan yang diberikan tidak maksimal, dan tenaga guru pada masa Jepang sangat terbatas. Selain itu, guru dan siswa mendapat beban tambahan. Beban tambahan tersebut menjadikan siswa dan guru tidak benar-benar berkonsentrasi dalam pelajaran di kelas.

Beban tambahan yang diberikan pada guru dan siswa seperti melakukan kerja bakti dan *Kinro Hoshi* (Wajib kerja tanpa upah bagi masyarakat pamong desa dan pegawai rendahan) untuk memperbaiki tempat umum, membangun

dan memperbaiki infrastruktur, bekerja di pabrik-pabrik, bekerja di sawah, menanam pohon jarak, dan lainnya. Kerja bakti ini dilakukan oleh semua siswa, bahkan siswa di sekolah rendah pada jam pelajaran akibatnya sedikit waktu untuk belajar. Kerja bakti ini bahkan menjadi bagian kurikulum sehingga proses pembelajaran yang lain menjadi terganggu.

Tidak hanya itu, proses belajar mengajar juga terganggu dengan adanya *Kushukeiho* atau tanda peringatan dari bahaya serangan udara. Peringatan serangan udara ini berupa sirene atau kentongan, dan ketika berbunyi siswa harus menggigit sepotong karet dan menyembunyikan diri di lobang perlindungan yang di bangun di halaman sekolah. Dan kejadian ini sering berlangsung Menurut Aiko Kurasawa : 368 (dalam Nuryanto, 2020: 59).

Siswa dan guru-guru yang selesai mengikuti pelatihan akan diberi ijazah. Nilai dikeluarkan sesuai dan diberikan untuk hasil pendidikan. Namun, sayang sejauh ini belum ditemui data yang akurat tentang sistem skor dan penilaian pada masa pendidikan Jepang. Pada masa ini, hal yang penting di catat adalah Jepang lebih menekankan untuk menghasilkan militer dan tenaga buruh, yang membuat usaha untuk pendidikan lanjutan menjadi kurang.pendidikan dasar dan masyarakat melek huruf lebih ditekankan dari pada penciptaan orang dengan kecakapan dan keahlian yang baik.

Menurut Aiko Kurasawa, 1993 : 362 (dalam Nuryanto, 2020) pada akhir tahun pendudukan Jepang *Euforia* sekolah sudah merosot dan siswa banyak yang mengalami drop out. Hal ini disebabkan karena krisis ekonomi sehingga siswa harus keluar dar sekolah untuk bekerja demi memenuhi kekurangan tenaga kerja akibat dari *Romusha*.

## I. Segi Pedagogis

1. Percaya diri, masa masa sebelumnya tidak semua kalangan pribumi bisa mengakses pendidikan. pendidikan yang sebelumnya berlapis-lapis dan sangat eksklusif. Kemudian pada masa Pendudukan Jepang mengubah sistem pendidikan menjadi lebih sederhana dan dapat diakses untuk semua kalangan, hal tersebut menjadikan masyarakat pribumi lebih percaya diri dan dapat merasakan pendidikan.
2. Sabar, tujuan pendidikan pada masa Jepang di Indonesia sebenarnya adalah menyediakan tenaga kerja cuma-cuma yang disebut dengan "*Romusha*" dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan demi

kepentingan Jepang. Oleh karena itu maka para pelajar diwajibkan mengikuti latihan fisik, latihan kemiliteran, dan indoktrinasi ketat. Hal ini terbukti dengan pelaksanaan senam setiap pagi yang disebut "*Taiso*" sebelum belajar juga bagi para pegawai sebelum kerja harus mengikuti komando dengan radio. Mengikuti latihan kemiliteran yang disebut "*Kyoren*" bagi para pelajar dengan barisannya yang disebut dengan "*Seinendan*", barisan keamanan rakyat yang disebut dengan "*Keibodan*" dan barisan prajurit yang disebut "*Heiho*"

3. Kerja keras, pada masa pendidikan Jepang murid-murid sering kali diharuskan kerja bakti, misalnya membersihkan bengkel, asrama, membuat bahan-bahan untuk kepentingan pertahanan, dan lain sebagainya. Kegiatan lain yang harus ditaati oleh para murid adalah kewajiban untuk membuat pupuk kompos atau beramai-ramai membasmi hama tikus disawah, dengan tujuan untuk melipatgandakan hasil bumi. Selain itu, sebagian waktu belajar digunakan untuk menanam halaman sekolah dan pinggir-pinggir jalan dengan tanaman jarak